

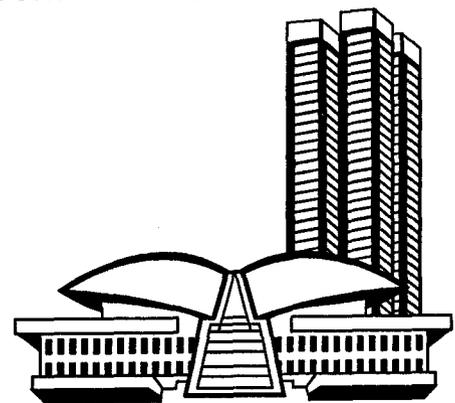
# Kajian

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

Vol. 19, No. 2, Juni 2014

ISSN 0853-9316

- **PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH BUPATI/WALIKOTA**  
(Studi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara)  
*oleh: Dian Cahyaningrum*
- **MENUJU PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) YANG CEPAT, TEPAT, ADIL, DAN MURAH**  
*oleh: Supono*
- **KONSTITUSIONALITAS KRITERIA MASYARAKAT (HUKUM) ADAT PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU -X/2012**  
*oleh: R. Yando Zakaria*
- **PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH TAHUN 2013**  
*oleh: Venti Eka Satya*
- **IMPLEMENTASI KEKUASAAN POLITIK GUBERNUR JOKO WIDODO DALAM MENINGKATKAN PRAKTEK GOOD GOVERNANCE**  
*oleh: Aryojati Ardipandanto*



Diterbitkan oleh  
**Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)**  
**Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI**

<b>KAJ.</b>	Vol.19	No. 2	Hal. 89-179	Jakarta Juni 2014	ISSN 0853-9316
-------------	--------	-------	----------------	----------------------	-------------------



# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

**Vol. 19, No. 2, Juni 2014**

**ISSN 0853-9316**

## **Daftar isi**

<b>Pengantar Redaksi .....</b>	<b>i-ii</b>
<b>PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH BUPATI/WALIKOTA (Studi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara) oleh: Dian Cahyaningrum .....</b>	<b>89-106</b>
<b>MENUJU PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) YANG CEPAT, TEPAT, ADIL, DAN MURAH oleh: Supono .....</b>	<b>107-126</b>
<b>KONSTITUSIONALITAS KRITERIA MASYARAKAT (HUKUM) ADAT PASCA- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU -X/2012 oleh: R. Yando Zakaria .....</b>	<b>127-144</b>
<b>PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH TAHUN 2013 oleh: Venti Eka Satya .....</b>	<b>145-166</b>
<b>IMPLEMENTASI KEKUASAAN POLITIK GUBERNUR JOKO WIDODO DALAM MENINGKATKAN PRAKTEK <i>GOOD GOVERNANCE</i> oleh: Aryojati Ardipandanto .....</b>	<b>167-179</b>



## PENGANTAR REDAKSI

Selamat berjumpa kembali para pembaca Jurnal Kajian yang terhormat. Jurnal Kajian Vol. 19 No. 2, Juni 2014 hadir dengan 5 tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan hasil kajian dari beragam perspektif, baik hukum, ekonomi, maupun politik. Diawali dengan tulisan yang merupakan hasil penelitian dari Dian Cahyaningrum yang berjudul "Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati/Walikota (Studi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara)". Menurut penulis, pendelegasian wewenang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Bupati/Walikota telah menimbulkan masalah. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif, diperoleh hasil bahwa IUP bermasalah juga terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur, baik karena adanya motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun motif "balas jasa" kepada pendukung pada pemilihan kepala daerah. Untuk mencegah dan mengatasi IUP bermasalah penulis mengusulkan beberapa hal, yaitu pembentukan Perda RT/RW; tindakan tegas kepada bupati/walikota dan penambang yang melanggar aturan; sinkronisasi dan harmonisasi UU No. 4 Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan pengawasan melekat.

Tulisan kedua masih berperspektif hukum, yang ditulis oleh Supono, berjudul "Menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang Cepat, Tepat, Adil, dan Murah." Salah satu tujuan dari UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah terwujudnya institusi/lembaga dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, termasuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Asas tersebut merupakan padanan dari asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tulisan yang mendeskripsikan dan menganalisis beberapa indikator untuk menilai keberhasilan PHI dalam menerapkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah ini menunjukkan bahwa PHI tidak terlepas dari berbagai kendala dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Kajian dari R. Yando Zakaria yang dituangkan ke dalam tulisan berjudul "Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 35/PUU -X/2012" menjadi tulisan ketiga dalam Kajian edisi kali ini. Meskipun sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, negara telah mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berikht hak-hak asal-usul yang melekat kepadanya, namun penulis berpendapat bahwa hampir tidak ada perangkat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK 35 Tahun 2012, yang tidak saja bermakna untuk menyelesaikan masalah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun lebih jauh mengandung pula putusan-putusan dan pandangan-pandangan Mahkamah atas apa yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat, termasuk kriteria dan mekanisme pengaturannya. Tulisan ini mengungkap 5 pelajaran penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014 terkait kejelasan tentang pengertian, kriteria, dan mekanisme pengakuan atas masyarakat hukum adat itu.

Tulisan berikutnya berjudul "Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013" oleh Venti Eka Satya. Tulisan ini menganalisis bagaimana kebijakan fiskal dan pelaksanaan transparansi pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan internasional terutama IMF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan fiskal Indonesia mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN) dan prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang terjadi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Production Sharing* pada kontrak-kontrak kerja Migas, pengelolaan PNBP, dan pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Jurnal Kajian edisi kali ini ditutup dengan tulisan yang merupakan hasil kajian dari Aryojati Ardipandanto berjudul "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek *Good Governance*". Penulis menilai Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016 Joko Widodo telah banyak melakukan langkah-langkah unik untuk merombak kinerja pemerintah daerahnya yang dipusatkan pada peningkatan praktek *good governance*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka diperoleh kesimpulan bahwa Gubernur Joko Widodo belum terlalu kuat dalam mengimplementasikan kekuasaan politiknya bagi peningkatan *good governance* dari sisi *rule of law*, transparansi, *consensus orientation*, akuntabilitas, dan *strategic vision*.

Demikian lima tulisan yang terdapat dalam Jurnal Kajian edisi Juni ini. Redaksi berharap tulisan-tulisan yang dimuat dalam jurnal kali ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. Redaksi juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan kualitas Jurnal Kajian.

REDAKSI